

TAHUN 2012

**ABSTRAK PENELITIAN MANDIRI PROGRAM STUDI FAKULTAS
HUKUM**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas Hasanuddin
Kampus Unhas Tamalanrea
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar

BIDANG ILMU EKOSOBUDKUM

1. Bidang Kajian Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM
BIDANG PERIKANAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**

LEGAL ANALYSIS TO THE LAW ENFORCEMENT IN CRIMINAL ACT OF THE LIVING ENVIRONMENT IN
FISHERY :
CASE STUDY IN PANGKAJENE ISLAND

Abd. Asis, dkk
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum lingkungan hidup tindak pidana lingkungan hidup di bidang perikanan (berdasarkan data kasus); dan untuk mengetahui sejauhmana faktor-fakator yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di bidang perikanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene (berdasarkan analisis putusan pengadilan). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkajene kepulauan, Kejaksaan Negeri Pangkajene kepulauan dan Kepolisian Resort Pangkajene kepulauan dengan alasan bahwa intansi tersebutlah yang secara *rill* bergerak pada wilayah penegakkan hukum dan keadilan khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain: (1) berdasarkan data di Pengadilan Negeri Pangkajene kepulauan, selama kurung waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebanyak 7 (tujuh) kasus adalah merupakan jumlah kasus yang sangat minimal diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkajene kepulauan; bahkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2007, 2010 dan 2011 tidak ada kasus yang diproses di peng-adilan dan tahun 2012 adalah jumlah kasus yang banyak yaitu 4 (empat) kasus; (2) berdasarkan analisis putusan Pengadilan negeri No. 98/PID.B/2012/PN. Pangkajene dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di bidang perikanan, dengan Terdakwa H. MUH KASIM Bin AMBO TANG bersama dengan terdakwa I ABD. HALIK Bin YOMA dan terdakwa II H. MUH JABIR Bin OKKE, bahwa terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti bahan peledak yang rencananya akan digunakan untuk penangkapan ikan, sehingga dalam dakwaan penuntut umum yaitu Perbuatan TERDAKWA didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, juga didakwa melanggar Pasal 84 ayat (1) UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang PERIKANAN Jo UU Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN, dan terdakwa I dan II melanggar Pasal 85 UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang PERIKANAN Jo UU Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 3 (tga) bulan. Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar UU Perikanan memenuhi semua unsur-unsur pidana pada pasal tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana lingkungan di bidang perikanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkaje-ne Kepulauan telah mencapai hasil yang maksimal dengan keberhasilan ber-dasarkan jumlah kasus yang sangat minimal, demikian pula dari putusan pengadilan dengan hukuman yang sangat maksimal kepada masing-masing terdakwa telah dipengaruhi oleh factor-faktor sebagaimana dijelaskan sebelum-nya, sehingga hal tersebut sangat kurang memberikan dukungan atas upaya penegakan hukum oleh karena tidak memberikan upaya jera terhadap pelaku-pelaku lainnya.

Kata Kunci :

ABSTRACT :

This Research is aim to know how far the law enforcement of the criminal act due to the living environment in fishery (according to the data of case) ; and to know how far factor can be involved due to the law enforcement in this matter refer to the jurisdiction of Pangkajene Court (according to the court decision analysis).. This research is located in Pangkajene Island Court,Kejaksaan Negeri Pangkajene kepulauan dan Police Resort Of Pangkajene Island with consideration that all the department mentioned are taking important role due to the law enforcement and justice specially in Criminal act of living environment in fishery. The result of this research,such as :: (1) according to data from the court in Pangkajene Island, within 6 (six) years from 2007 to 2012, as much as 7 (seven) cases which were in very minimal number of cases that been process and finished to decided by the court of Pangkajene island; even in 3 (three) years from 2007, 2010 dan 2011, there were no case proceed, and 2012 , there were four cases; (2) According to the analysis decision of the court no. 98/PID.B/2012/PN. Pangkajene on case of Criminal act in fishery ,with a defendant H. MUH KASIM Bin AMBO TANG together Co defendant I ABD. HALIK Bin YOMA and co defendant II H. MUH JABIR Bin OKKE, explained that the defendants have found the evidence like exploded things that plant to use in catch fish so in the prosecuter application the act of defendant is as mentioned in law criminal act article 1 point (1) Emergency Law Number: 12 year 1951 Jo article 56 point (2) KUHP, also defendant violent article 84 point (1) Law number UU: 31 year 2004 about FISHERY Jo Law number : 45 year 2009 of change on Law number: 31 year 2004 of FISHERY, and Co defendant I and II violated article 85 Law number: 31 year 2004 Of FISHERY Jo Law number: 45 year 2009 of the changes on Law number : 31 year 2004 of

FISHERY Jo article 56 point (2) KUHP and each of defendant punished criminal sentenced as much as 3 (three) months. So according to the law facts whether from the witnesses, defendant and evidence , in the cases that researcher analysis all are violated the law of fishery. The Result of this research concluded that the law enforcement in living environment of fishery in court of Pangkajene Island jurisdiction has the maximal improvement with the succeeded of minimal case, also the final decision court of the punishment with the maximal punishment to each defendant have much been involved to the factors as mentioned before so for that reason, can be concluded is still less of supported due to law enforcement because do not give the maximal effect to the perpetrator

KeyWord:

KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

AN AUTHORITY OF GOVERNOR AS THE REPRESENTATIVE OF CENTRAL GOVERNMENT

Muh. Hasrul
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan sejauh mana Perundang-undangan tersebut dapat memberikan penguatan kelembagaan Gubernur dalam menjalankan kewenangannya serta hubungan yang sinergis antara Gubernur dan Kepala Daerah-Kepala Daerah dalam lingkup Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di MAMMINASATA. Data dikumpulkan melalui penelusuran bahan kepustakaan dan dokumentasi sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Diamping itu, data juga diperoleh melalui wawancara, kuisioner dan survey diluilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu data sekunder dan primer yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara verbal berwujud kata-kata, tidak berwujud rangkaian angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, UU no 19 tahun 2010, UU no 38 tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana di dalamnya telah mengatur secara jelas hirarki antara pemerintah pusat dan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, (2) sinergitas antara pemerintah, Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota tercipta dengan adanya distribusi kewenangan yang baik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang sehat dan bersih, dan (3) hubungan kelembagaan antara gubernur dan Pemerintah melalui fungsi pengawasan dan pembinaan secara sinergis dan simultan serta dengan penguatan koordinasi pengawasan dan pembinaan di daerah sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Peraturan Perundang-undangan, kewenangan

ABSTRACT :

The aims of this research are to know an assembling regulation which arrange the governor authority and how that regulations could strengthen the governor organization to drive its authority and to create communication between the governor and local government in South Sulawesi. The research is located in South Sulawesi by chosen several regions such as: Makassar, Sungguminasa and Takalar. The data was collected through literature and documentation studies as a primary rule data, secondary rule data and tertiary rule data. In addition, it's was collected through interview, overspread questionnaire and survey directly to the field of research. Collecting data was analyzed by using qualitative analysis method. The results reveal that (1) the rules about the governor authority as the representative of the center government stated into the act number 22 in 1999, the act number 19 in 2010, the act number 38 in 2007 and the act number 32 in 2004. That rules has set up a clear hierarchy and the authority between center of government and governor, (2) the connection between the center and local government would create good governance, (3) institutional

relationships between the governors and the Government through supervision and guidance function synergistically and simultaneously with the strengthening of coordination and supervision and guidance in the area in order to create good governance.

KeyWord: Rules, an Authority

PENGANGKATAN ANAK GOLONGAN TIMUR ASING TIONGHOA

Aulia Rifai

Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Pengangkatan anak di Indonesia tidak diatur secara khusus kecuali untuk golongan Timur Asing Tionghoa melalui Staasblad 1917 No. 129 jo Staatsblad 1924 No. 557. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan sedangkan dalam masyarakat Tionghoa, apabila dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak laki-laki maka perlu dilakukan pengangkatan anak. Oleh karena itu adopsi dipandang sebagai suatu hal yang lazim dilakukan sehingga ada pengaturannya sendiri. Dengan demikian untuk golongan Timur Asing Tionghoa tidak diperbolehkan lagi mengangkat anak yang didasarkan pada hukum adatnya melainkan harus mengikuti ketentuan Staasblad 1917 No. 129 jo Staatblad 1924 No. 557 yaitu mengikuti prosedur harus dengan akte notaris tetapi dalam kenyataannya golongan Timur Asing Tionghoa lebih suka menggunakan hukum adatnya sendiri.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak Golongan Timur Asing Tionghoa

ABSTRACT :

Adoption in Indonesia not specifically except for the East bracket with Chinese Foreign Staasblad No. 1917. 129 jo Staatsblad No. 1924. 557. Book of Civil Law Act (Civil Code) sees the marriage as a form of living together, not to hold a descent while in Chinese society, if marriage is not blessed with a boy it is necessary to adoption. Therefore, adoption is seen as a common thing done so that there is the setting itself. Thus, for a group of Chinese Foreign Easterners no longer be allowed to adopt a child that is based on customary law but must follow the provisions Staasblad No. 1917. 129 jo Staatsblad No. 1924. 557 the following procedures should the notary deed but in fact the group of Chinese Foreign Easterners prefer to use their own customary law

KeyWord: Adoption, Chinese Foreign Easterners

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

PROTECTION AND THE FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS IN PERSPECTIVE LAW ENFORCEMENT

Irwansyah

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimanakah wujud dari perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia baik berupa prinsip-prinsipnya, peraturan-peraturannya, maupun mekanisme penegakannya perlindungan hukumnya bagi masyarakat? (2) Bagaimanakah bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia dari aspek substansi peraturan perundang-undangan dan dukungan institusi HAM? Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian sosio yuridis. Penelitian yuridis normatif dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Sedangkan penelitian sosio yuridis digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Untuk lebih mempertajam kedua jenis penelitian tersebut, selanjutnya didukung oleh beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum yuridis normatif (Johnny Ibrahim, 2005:3000), yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum dan data hukum dalam penelitian ini adalah (1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan. (2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum. (3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel, Peneliti akan uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola kecenderungan dan modus operandi sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penyusunan perundang-undangan HAM ke depan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan tiga hal berikut:

1. Perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 hasil amandemen, sampai kepada beberapa ketentuan undang-undang yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) generasi HAM.
2. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengadakan perlindungan HAM melalui langkah institusional (pembentukan institusi HAM: Komnas HAM dan Peradilan HAM) yang diikuti dengan proses penegakan hukumnya, yaitu peradilan HAM bagi pelanggaran HAM, termasuk didalamnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan putusan yang secara substansial dipandang sebagai pemenuhan nilai-nilai HAM.

Dapat dikemukakan saran: (1) Perlunya political will pemerintah untuk memproses secara hukum setiap pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat di masa lalu, agar bangsa Indonesia dapat menegakkan hukum dan HAM nya secara beradab dan konsisten. (2) Perlunya dieksplorasi nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat, agar substansi HAM Indonesia dapat sesuai dengan keadaan sosiologis masyarakatnya.

Kata Kunci :

ABSTRACT :

This research aims to find out (1) what forms of protection and fulfillment of human rights in Indonesia either in the form of his principles, his set, as well as his legal protection mechanism of enforcement for the community? (2) How does the shape of the liability and responsibility of Governments in the protection and fulfillment of human rights in Indonesia from aspects of the substance of legislation and support the institution of human rights? This research combines the two types of research, i.e. normative juridical research and research socio juridical. normative juridical research is used to answer the first problem formulation. While the juridical research socio used to answer the second problem formulation to further sharpen both types of such research, further supported by a number of approaches that are known in the juridical normative legal research (Johnny Ibrahim, 2005: 3000), namely: statute approach, conceptual approach, philosophical approach and case approach. The type of material law and legal data in this study was (1) the primary legal Materials, legal materials consisting of a rule of law which is explained on the basis of a hierarchy of legislation. (2) Secondary legal material is legal material gleaned from text books, journals, the opinions of scholars, legal cases. (3) Legal materials tertiary is a law that gives a clue to the meaning or explanation of law of primary and secondary legal materials such as dictionaries, encyclopedias. Legal materials obtained in the research studies, librarianship, statutory rules and

articles, Researchers will describe and connect in such a way, so that it is presented in the writing of more systematic in order to respond to the problems that have been formulated. That way the processing of legal materials made in deductive, i.e. drawing conclusions from a concrete problems encountered. Furthermore the existing legal material is analyzed to see the pattern of trends and modus operandi that can be helpful as a basis of reference and legal considerations that are useful in drafting human rights legislation forward. Based on the results of the research, it can be concluded the following three things:

1. The protection and fulfilment of human rights in Indonesia has poured in a wide range of legislation, ranging from the Constitution to amendments, until the results of some of the provisions of the legislation which are grouped in three generations of human rights.
2. The Government has a responsibility to make the protection of human rights through institutional measures (establishment of human rights institutions: the National Commission on HUMAN RIGHTS and the judiciary human rights) which is followed by the process of law enforcement, the judiciary, human rights for human rights violations, including rulings of the Constitutional Court that gave birth to the verdict which substantially was seen as the fulfillment of HUMAN RIGHTS values.

Can put forth suggestions: (1) The need for the political will of the Government to legally process every human rights violations particularly severe human rights violations in the past, so that the people of Indonesia can enforce the law and human rights in his civility and consistently. (2) The necessity of explored local wisdom values on society, so that the substance can match Indonesia human rights by State sociological society.

KeyWord:

Keadilan Substantif dalam Putusan Pergeser Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Marwati Riza, Achmad Ruslan, Kasman Abdullah dan M Guntur Alfie
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemikiran hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan asas-asas hukum yang mendukung putusan bernuansa keadilan substantif, serta untuk mengetahui pula apa implikasi normatif dari putusan yang bernuansa keadilan substantif dalam perkara pemilukada. Untuk mencapai hal tersebut maka penelitian ini difokuskan pada kajian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan Pemilukada. Penelitian menggunakan metode kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau *“gegevens van het recht”* Dengan demikian, perolehan data dilakukan melalui kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, berupa putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa kepustakaan di bidang Filsafat Hukum, Hukum Tata Negara, Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran para Hakim MK dalam memberikan putusan dalam perkara Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) adalah memperluas kompetensi yang dimiliki MK, hal tersebut didasarkan semata-mata untuk penegakkan konstitusi dan pemenuhan keadilan substantif, yakni bahwa hasil Pemilukada adalah manifestasi suara rakyat, sehingga perselisihan Pemilukada tidak dapat dilihat sebagai perselisihan di atas kertas, tetapi dilihat bagaimana suara itu diperoleh dengan tidak melanggar prinsip konstitusional pemilihan umum, yakni langsung; umum; bebas; rahasia; jujur; dan adil, serta sesuai dengan prinsip universal *“nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria”* (tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain). Oleh karena itu, dalam proses Pemilukada tidak boleh ada pembiaran pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga perolehan suara Pemilukada tidak merugikan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta masyarakat yang mendambakan demokrasi yang berkeadilan. Dalam proses peradilan, Hakim MK telah menerapkan asas *audi et alteram partem* atau hak untuk didengar secara seimbang, dan Asas Hakim aktif, serta 4 (empat) asas peradilan yang baik yaitu (1) *Decise beninsel (right to a decision)*; (2) *Verdidigings beginsel (a fair hearing)* ;(3) *Onpartijdigheids beginsel (no bias)* ;dan (4) *Motiverings beginsel (reasons and argumentations of decision)*. Selanjutnya, implikasi yuridis dari putusan MK yang bernuansa

keadilan substantif adalah dalam pelaksanaan putusan, berbagai varian amar putusan MK melahirkan potensi persoalan secara substantif, antara lain tidak adanya standar baku dalam menentukan limitasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diterapkan oleh MK, sehingga menimbulkan multi persepsi dalam merespon putusan MK, dan terdapat satu putusan yang melahirkan Implikasi yuridis yang dengan sendirinya telah merubah ketentuan hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama yang berkaitan dengan *legal standing* Pemohon.

Kata Kunci : Keadilan Substantif; Putusan Mahkamah Konstitusi; Pemilukada

ABSTRACT :

This study aims to determine the legal construction of judges of the Constitutional Court (MK) and the general principles of law that supports the verdict nuanced substantive justice, and to know also what the normative implications of the decision of the nuances of substantive fairness in election of regional head cases. To achieve this, this research focuses on the study of the decisions of the Constitutional Court in the case of election of regional head disputes. Research using normative legal analysis to understand the application of the legal norms of the facts, necessitating an examination of the elements of the law or "*gegevens van het recht*". Thus, the acquisition of data is done through literature, through the collection of secondary data that includes primary legal materials in the form of decisions and legislation, as well as secondary legal materials in the form of literature in the field of Philosophy of Law, Constitutional Law, Constitutional Law on the Court Constitution, and other books related to the study, then analyzed by descriptive qualitative. The results showed that the legal construction of the judges in the Constitutional Court gave judgment in the case of election of regional head (Pemilukada) is expanding its competence the Court, it is based solely on the Constitution and the rule of substantive justice, namely, that the results of the election of regional head is a manifestation of the people's voice, so that the dispute can not be seen as Election disputes on paper, but see what the noise was obtained without violating the constitutional principle of the general election, which is direct; public; freely; secret; honestly and fairly, and in accordance with universal principles "*nullus / nemo commodum capere de injuria sua propria potest*" (one should not be disadvantaged by the irregularities and the offense itself and no one should be disadvantaged by irregularities and violations committed by others). Therefore, in the election of regional head there should be no impunity violations systematic, structured, and massive, so it does not harm the voting Election candidate Regional Head and Deputy Head, and people who desire a just democracy. In court proceedings, Judge Court has applied the principle *audi et alteram* or the right to be heard in a balanced way, and the principle of active judges, as well as four (4) principles of justice either: (1) *Decise beninsel* (right to a decision), (2) *Verdidigings beginsel* (a fair hearing), (3) *Onpartijdigheids beginsel* (no bias), and (4) *Motivering beginsel* (Reasons and argumentations of decision). Furthermore, the juridical implications of the decision of the Court that the Court ruling of potential problems in substantive spawned, among others, the lack of standards in the Revoting Limitations Determine (RLD=in English PSU in Bahasa) imposed by the Constitutional Court, leading to multi-perception in response to the decision of the Constitutional Court, and there is one decision that gave birth to its own juridical implications have changed the law Dispute Event election of regional Head and Deputy Head, particularly with regard to the applicant's legal standing.

KeyWord: Substantive Justice; Decision of the Constitutional Court; Election of Regional Head.

KESEIMBANGAN PEMANFAATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DENGAN MODEL AFFIRMATIF ACTION

THE EQUILIBRIUM OF MANAGEMENT UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES WITH AFFIRMATIVE ACTION MODEL

Abrar Saleng
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Penelitian bertujuan untuk mengetahui keseimbangan dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam pertambangan, terutama keseimbangan antar daerah dan perwujudan keadilan dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam pertambangan terutama di tiga wilayah yaitu areal pertambangan PT. Vale Tbk, PT. Antam Tbk, dan PT. Freeport Indonesia Tbk. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, karena pada wilayah atau lokasi penelitian tempat perusahaan pertambangan belum memberikan kesejahteraan yang optimal kepada masyarakat yang seharusnya mereka terima dan rasakan sebagai eksternalitas positif dari pengelolaan dan perusahaan pertambangan. Hasil penelitian lainnya menunjukkan belum ada keadilan yang proporsional akibat ketidakseimbangan antara eksternalitas positif dengan eksternalitas negatif dari pengelolaan perusahaan pertambangan, karena itu untuk mencapai keseimbangan dibutuhkan keberpihakan (*affirmatif*) kepada masyarakat sekitar, melalui program atau kegiatan (*action*). Akhirnya direkomendasikan bahwa dibutuhkan *redesign regulasi* pengelolaan perusahaan pertambangan yang berorientasi keseimbangan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sebagai pemegang kedaulatan terhadap sumber daya alam, melalui keberpihakan atau diskriminasi positif.

Kata Kunci :

ABSTRACT :

This research aims to know the equilibrium in utilizing the management of mining natural resources, especially the equilibrium among areas and justice actualization in utilizing the management of mining natural resources, especially in three areas, those are : PT. Vale Tbk, PT Antam Tbk, and PT Freeport Indonesia Tbk. The result of the research also shows deviation toward meaning and value found in constitution because areas or mining research locations have not given optimal prosperity toward society that should be accepted and felt as positive externality of management and mining exertion. The result of the other researches have not shown proportional justice because unbalance between positive and negative externality of mining management. Therefore, to reach equilibrium needed supporting (affirmative) toward society through programs or activities (action) Finally, it is recommended that it is needed to redesign the regulation of mining management which is oriented to the equilibrium and the actualization of society prosperity as sovereignty holder toward natural resources through supporting or positive discrimination.

KeyWord:

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN SOPPENG

Suriyaman Mustari Pide
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Ketika Hak Ulayat telah beralih ke hak individu, maka dalam realitas sosial secara otomatis mengubah sekaligus menggeser keberadaan dan eksistensi hak ulayat (deulayatisasi) dan tidak dapat dipulihkan kembali menjadi hak kolektif. Adanya kesalahan persepsi terhadap hukum positif (UUPA) cenderung mengarah pada kompleksitas masalah pertanahan dan tidak menutup kemungkinan berujung pada konflik, baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Hapusnya Hak Ulayat dalam penguasaan hak atas Tanah Adat, tidak berarti hak tradisional lainnya sebagai nilai-nilai kearifan lokal juga ikut berakhir. Meskipun sifatnya heterogen di berbagai wilayah, namun dianggap sangat relevan utamanya dalam penegakan hukum, bahkan menjadi perekat dan penunjang terpeliharanya keutuhan bangsa. Dalam kaitannya dengan sengketa penguasaan hak atas tanah, kearifan lokal memiliki keunikan bagaimana suatu sengketa dapat dan seharusnya diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana eksistensi kearifan lokal dalam realitasnya dapat memenuhi dan menjawab dari sekian banyak dan begitu kompleksnya masalah sengketa tanah di dalam masyarakat hukum adat. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka populasi penelitian adalah warga masyarakat di Kabupaten Soppeng, khususnya di daerah Mariorawa. Secara cultural di daerah tersebut diindikasikan masih eksis nilai-nilai kearifan lokal dalam tubuh masyarakatnya. Besaran sampel adalah sebanyak minimal 50 orang di lokasi penelitian dan

ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keberadaan masyarakat hukum adat dengan seperangkat kearifan lokal masih eksis sebagai salah satu lokalitas pondasi kebhinnekaan budaya Indonesia, (2) Deulayatisasi oleh karena kebijakan pemerintah melalui penetapan produk hukum positif, menjadikan eksistensi hak ulayat tereliminir seiring dengan perkembangannya. Sinergitas antara kebijakan pemerintah dan masyarakat hukum adat terhadap perlindungan hak atas tanah, belum menunjukkan efektifitasnya karena masyarakat belum memahami secara utuh kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang mengakomodir hak-haknya. (3) Proses penyelesaian sengketa tanah yang ada di Kabupaten soppeng, masih cenderung dilakukan melalui proses nonlitigasi yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal (perdamian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi). Ketidak pahaman masyarakat akan UUPA berimplikasi pada *overgeneralisasi* tentang penguasaan hak atas tanah, sehingga masyarakat ulayat cenderung secara spontanitas lebih memihak pada aturan nonlitigasi yakni dengan berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal sebagai pondasi keutuhan masyarakat yang damai dan seimbang.

Kata Kunci :

ABSTRACT :

When the Land Rights has been switched to the right of the individual, the social reality shifts automatically change once the existence and the existence of customary rights (*deulayatisasi*) and can not be recovered into a collective right. An error in the perception of positive law (BAL) is likely to lead to the complexity of land issues and did not rule lead to conflict, both between communities, government and the private sector. Abolishment of Land Rights in Customary Land tenure rights, does not mean other traditional rights as indigenous values also come to an end. Despite its heterogeneous in many areas, but are considered highly relevant especially in law enforcement, and even the glue and supporting maintenance of the integrity of the nation. In relation to disputes over land tenure rights, local knowledge is unique how a dispute can and should be resolved. This study aims to explore the extent to which the existence of local wisdom in reality to meet and answer of the many and the complexity of the problem of land disputes within the community itself. To achieve the objectives of this study, the study population was Soppeng citizens in the district, particularly in the area Marioriawa. Culturally in the area indicated values still exist within the indigenous community. Sample size is as much as at least 50 people in the study site and determined by purposive sampling. The results showed that (1) presence of customary law communities to set local wisdom still exists as one of Indonesia's cultural diversity foundation locality, (2) *Deulayatisasi* caused by government policies through the establishment of a legal product is positive, resulting in the existence of customary rights to be eliminated along with the development. Synergy between government policy and the protection of indigenous peoples rights to land, not to show its effectiveness because people do not understand fully the policy as a policy that accommodates their rights. (3) The process of settlement of land disputes in the district Soppeng, still tends to be done through non-litigation processes that refer to the values of local wisdom (peace through negotiation, consensus agreement, and mediation). The unfamiliarity of the BAL will have implications on over generalization about control of land rights, land rights so that people tend to spontaneously favored the non-litigation rules based on the values of local wisdom as a foundation of integrity and peaceful society in balance.

KeyWord:

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP PERKELAHIAN KELOMPOK DI KALANGAN REMAJA KOTA
MAKASSAR**

Wiwie Heryani, Ratnawati, Rastiawaty,
Aspar Sesaria, Andi Tomy Aditya Mardana
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkelahian kelompok kalangan remaja di Makassar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal bahwa adanya solidaritas kelompok, rasa dendam, serta ego fakultas yang sangat sulit dihilangkan dan faktor eksternal bahwa adanya hasutan senior untuk melakukan tawuran, pengaruh minuman keras, isu provokasi, faktor sekolah/kampus yang tidak merangsang siswa/mahasiswanya untuk belajar, serta pengaruh media massa mempunyai korelasi yang erat dengan meningkatnya perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkelahian kelompok di kalangan remaja Kota Makassar dengan cara memberikan pendidikan agama, memaksimalkan peran komisi disiplin baik di tingkat fakultas maupun universitas, pendirian pos Polisi untuk membantu satuan pengamanan (satpam) kampus sebagai pencegahan tawuran serta memperbaiki pola pengkaderan pada mahasiswa baru yang bukan hanya doktrin fakultas tetapi juga doktrin universitas.

Kata Kunci : Perkelahian Kelompok, Remaja

ABSTRACT :

The research results indicates that the group fights among teens in Makassar is influenced by two factors: internal factors that the group solidarity, resentment and ego faculty are very difficult to remove and external factors that the senior incitement to commit brawl, the influence of liquor, the issue of provocation, factor of the school /college that does not stimulate students / students to learn, as well as the influence of the mass media has a close correlation with the increase in aggressive behavior by teenagers. Efforts are made to prevent fights among groups of teenagers Makassar by providing religious education, maximizing the role of the disciplinary committee at both the faculty and the university, the establishment of the post of Police to assist security forces (guards) as a preventative campus brawl and improve regeneration patterns in student new, not just doctrine but also the doctrine of the university faculty.

KeyWord: Fighting Group, Teen

**KEPENTINGAN UMUM DALAM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN BERDASARKAN KONVENSI UPOV,
UU 29/2000 DAN KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN KEPENTINGAN
UMUM**

PROVISIONS OF PUBLIC INTEREST IN PLANT VARIETY PROTECTION UNDER UPOV CONVENTION, LAW
NUMBER 29 OF 2000, AND THE BALANCE IN PLANT VARIETY PROTECTION AND PUBLIC INTEREST

Winner Sitorus
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan Kepentingan Umum dalam Perlindungan Varietas Tanaman berdasarkan Konvensi UPOV, UU 29/2000 dan Keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman dan Kepentingan Umum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan mengkaji konvensi atau perjanjian internasional dan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang varietas tanaman: Konvensi UPOV, *The International Undertaking on Plant Genetic Resources*, *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGR)*, dan UU No.29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan umum telah diatur secara sumir dalam Konvensi UPOV, oleh karena itu pengaturan yang lebih jelas bergantung pada negara-negara peserta konvensi. Pengaturan kepentingan umum dalam UU 29/2000 dalam bentuk ketentuan-ketentuan pembatasan dan pengecualian masih membutuhkan pengaturan yang lebih jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang menyimpang dari maksud pembuat undang-undang dan tujuan perlindungan HKI. Adanya ketentuan-ketentuan "TRIPs plus" menyebabkan ketentuan-ketentuan

kepentingan umum dalam konvensi UPOV dan UU 29/2000 menjadi lemah keberlakuannya. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian perdagangan secara bilateral maupun multilateral. Pemerintah Indonesia harus berani secara tegas menolak ketentuan-ketentuan perjanjian yang melemahkan atau mengabaikan kepentingan umum dalam perlindungan Varietas Tanaman.

Kata Kunci : Kepentingan Umum, Varietas Tanaman, Keseimbangan, Kebijakan

ABSTRACT :

This article aimed at studying provisions of public interest in plant variety protection under UPOV convention, Law Number 29 of 2000, and the balance in plant variety protection and public interest. The approach used is statutory and conceptual approaches by analysing convention or international agreement and statutory rules in plant varieties: UPOV convention, *The International Undertaking on Plant Genetic Resources*, *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGR)*, dan Law Number 29 of 2000 regarding Plant Varieties Protection. It is concluded that public interest has been stipulated briefly in UPOV Convention, therefore further and clearer stipulation depends on convention member states. The ruling of public interest in Law Number 29 of 2000 in form of limitation and exception provisionns still need clearer and further stipulating so that it does not result in different interpretationn from the meaning aimed by the Law maker and the purpose of intellectual property right itself. The existence of provisions called "TRIPs plus" make public interest provisions in UPOV convention and Law Number 29 of 2000 to be ineffective. Therefore, it is needed an effort to improve bargaining position of Indonesia in trade agreement either bilaterally or multilaterally. In addition, Indonesia government should have courage to refuse firmly agreement provisions that deny public interest aspect in plant variety protection.

KeyWord: Public Interest, Plant Varieties, Balance, Policy.

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI SEKTOR KEHUTANAN
(Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Gowa)**

THE LEGAL PROTECTION IN MAINTAINING THE PROTECTED FOREST IN GOWA REGENCY

M. Yunus Wahid, & M. Zulfan Hakim
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penegakan hukum dalam perlindungan hukum terhadap hutan lindung di kabupaten Gowa, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif, disertai penelitian lapangan sebagai data pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dalam perlindungan terhadap hutan lindung telah berjalan dengan efektif, ditandai dengan berkurangnya perambahan oleh warga sekitar sejak 3 tahun terakhir. Hasil lainnya menunjukkan bahwa sinergitas antar instansi dalam upaya perlindungan hukum terhadap hutan lindung telah berjalan dengan baik. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan terhadap kawasan hutan lindung antara lain kurangnya aparat dari instansi kehutanan, tapal batas yang tidak jelas serta partisipasi masyarakat dlam menghadiri penyuluhan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

Kata Kunci :

ABSTRACT :

This research is aimed to find out how the effectiveness of the legal protection in maintaining the protected forest in Gowa Regency, also to find out how the agencies manage to work together to preserve the protected forest. In addition, this research is also aimed to find out things that become obstacles in the effort of protecting the protected forest. The result of this research indicates that the law has provided enough protection to the forest, also the agencies that involved in that act has been very well in their work. The difficulties in this line of task was the short number of employee to handle such a wide area, also the public participation on the effort are rather poor than what the government expected.

KeyWord:

**EFEKTIVITAS KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR DALAM PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN TANAH DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
HAK ATAS TANAH
(Studi Tahun 2011 Sampai Bulan Mei 2012)**

Faisal Abdullah, dkk
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRACT :

Implementation of the provisions of article 19 of the UUPA, by government regulation enacted number 10 of 1961 on Land Registration, which was then replaced by Government Regulation number 24 of 1997 on Land Registration (hereinafter referred to as PP. 24/1997). Registration includes land surveying, mapping, registration of land rights, transfer rights to other parties, as well as the provision of a letter of proof of the right of which is a strong evidence. Giving evidence in the form of a certificate of rights preceded by registration of land, mainly devoted to the subject of rights in order for the subject to obtain certainty about the rights. The land registration of Indonesia conducted by National Land Agency. National Land Agency is a non-ministerial government institution in Indonesia, which has the task of carrying out the task of governance in the land sector in national, regional and sectoral dimensions. Result of this land registration get the rights of land who owned by the per-person or legal entity in accordance with the terms and conditions set forth in the UUPA. Article 2 of Presidential Decree Number 10 Year 2006 on National Land Agency states that the National Land Agency has the task of carrying out the task of governance in the land sector in national, regional and sectoral. Therefore, the BPN-RI in the future must be able to control the formulation of national policies in the areas of land, technical policies, plans and programs, implementation of land administration services in order to ensure legal certainty of land rights, land management, agrarian reform, governance and ownership land rights, including community empowerment.

KeyWord:

**KONSTITUSIONALISASI HAK ATAS LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA**

Zulkifli Aspan
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Korelasi antara hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak asasi manusia teridentifikasi dari hasil analisis historis, teoretik dan filosofis. Secara historis, hak manusia atas lingkungan yang merupakan isu sentral pasca-generasi pertama dan merupakan bagian dari sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Secara teoretik, hak manusia atas lingkungan merupakan hak yang terelaborasi dari kajian teoretik hak asasi manusia. Secara filosofis, hak manusia atas lingkungan merupakan hak yang esensial dalam studi hak asasi manusia. Sedangkan, konstitusionalisasi prinsip hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai *fundamental rights* pada dimensi filosofis, politik, dan hukum yang merupakan syarat mutlak konstitusionalisasi hak manusia atas lingkungan sebagai *fundamental rights* pada suatu negara. Konstitusionalisasi hak manusia atas lingkungan yang sehat dan layak pada suatu negara tidak akan komprehensif untuk berimplikasi terwujudnya tatanan lingkungan yang universal manakala tidak terimplementasi ketiga dimensi tersebut. Termasuk dalam konteks ini adalah Indonesia. Pengalaman ketatanegaraan Indonesia tidak pernah mengimplementasikan ketiga dimensi *fundamental rights* tersebut dan prinsip konstitusionalisasi kecuali hanya dalam bentuk terinkorporasinya hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat secara terbatas. Berbeda dengan pengalaman beberapa negara seperti Swiss, Latvia, Norwegia, dan Ekuador sebagai negara yang relatif mengimplementasikan ketiga dimensi tersebut dan merupakan negara dengan kualitas lingkungan terbersih didunia (2010). Atas dasar tersebut, temuan penelitian ini adalah gagasan konstruktif yang diistilahkan dengan *Konstitusi Negara Modern yang Berbasis dan Berorientasi terhadap Tatanan Lingkungan yang Universal* yang memuat prinsip umum dan khusus. Gagasan tersebut

merupakan hasil elaborasi ketiga dimensi kumulatif konstutisonalisasi hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai *fundamental rights* (filosofis, politik dan hukum).

Kata Kunci :

**DAMPAK PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI KAPAL PINISI SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN TARAF EKONOMI MASYARAKAT BULUKUMBA DI SULAWESI SELATAN**

Hasbir
Fakultas/Jurusan : Hukum/

ABSTRAK :

Dipilihnya Hak Desain Industri Kapal Pinisi ini sebagai fokus penelitian mengingat bahwa, Hak Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization* (termasuk Indonesia). Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan memahami sejauh manakah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri memberikan Perlindungan Hukum terhadap desain kapal pinisi di Bulukumba, Untuk mengetahui dan memahami sejauh manakah Dampak Perlindungan Hak Desain Industri Kapal Pinisi mampu meningkatkan taraf ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan normatif (*statuta aproach, historical aproach*) serta pendekatan empirik (*sociological aproach*), melalui teknik pengumpulan data, wawancara langsung dan dengan pengisian kuesioner yang telah disiapkan, catatan harian dan observasi. Data yang diperoleh dari penelitian diolah dengan teknik analisis kualitatif (teknik analisis dengan menggunakan analisis secara non-numerik) dan teknik analisis deskriptif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak desain industri terhadap Kapal Pinisi belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi, kreativitas untuk berkarya, serta sikap dan pengetahuan masyarakat tentang hak kekayaan Intelektual, khususnya hak Desain Industri. Oleh karena itu maka perlu kiranya pihak Kantor Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Bulukumba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, pendaftaran hak Desain Industri Kapal Pinisi yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2002 belum memberikan kontribusi ekonomi bagi pemerintah Bulukumba khususnya masyarakat Bontobahari. Sehingga perlindungan hukum hak Desain Industri bagi kelompok masyarakat produsen dan pengrajin Kapal Pinisi di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat belum dapat terwujud

Kata Kunci :